

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Peranan

Peranan merupakan suatu tindakan yang lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto (1987:221).

Soedjono Soekanto juga mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Akan tetapi sedangkan menurut Poerwodarminta (1995:571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan. Dimiliki oleh orang atau seseorang yang kedudukannya

dimasyarakat. Peran menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah,“ merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam suatu masyarakat”’.

Bryant dan White dalam Amira (2012: 9) menyatakan bahwa peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Definisi Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang didalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut tersebut.

Pengharapan merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya peran. Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisasi (lembaga atau institusi formal) karena dari peran tersebut dapat diketahui struktur organisasi yang ada di suatu lembaga atau institusi yang berisi tentang uraian status atau kedudukan seseorang atas suatu peran yang harus dilakukan dan bersifat kolektif. Peran diperoleh dari uraian jabatan atas suatu yang sesuai dengan adanya teori diatas sehingga dapat dikemukakan bahwa peran merupakan suatu tindakan seseorang atau lembaga dimana posisi seseorang yang melakukan atau memainkan interaksi antara individu-individu atau secara berkelompok dengan maksud dan tujuan yang sama dalam meretas kejadian yang akan diselesaikan.

Dari beberapa teori yang dipaparkan diatas sehingga pada teori Soerjono Soekanto yang lebih menekan pada posisi seseorang yang

menempatkan diri pada keadaan yang memaksanya harus bertindak sesuai keinginan dan tanggungjawabnya sebagai seorang individu yang bermasyarakat. disamping itu pula peranan yang dimaksud dalam hal ini lebih mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga negara dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap pembangunan daerah. Adapun lembaga negara yang dimaksud ialah Tim Pengawasan Pengamanan dan Pembangunan Daerah (TP4D) lembaga tersebut memiliki peranan yang sangat penting terhadap pengkoordinasian sesama lembaga pemerintah akan pentingnya pembangunan berskala nasional dan pembangunan daerah.

Dalam hal ini peranan juga mencakup indikator keberhasilan dimana suatu lembaga dapat menjalankan roda pemerintahan berdasarkan hal berikut yakni :

#### **1. Akuntabilitas**

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan<sup>9</sup>

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang dilakukan oleh individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik maupun keamanan Negara. Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrument untuk kegiatan control

---

<sup>9</sup> Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, Edisi Ketiga-1987, hal.16

terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparansi kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya.

Ellwood menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas Yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum) yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu :<sup>10</sup>

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penyalahgunaan sumber dana publik.
- b) Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, system informasi manajemen

---

<sup>10</sup> Hamid, Abidin, Pirac. "Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan" Diskusi Publik, [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)., Lampung, tertanggal 7 Januari 2003.

dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

c) Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal.

d) Akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dalam penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.
- 4) Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan Teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

---

<sup>11</sup> Winarno Surakhmad. Metode dan Teknik Akuntabilitas, Bandung: Tarsito, 1994, hal. 46.

Sehingga Dengan demikian peranan tidak dapat dipisahkan dari tanggungjawab (akuntabilitas) baik individu maupun kelompok, apapun kedudukannya tanggungjawab harus tetap diutamakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang didasari dengan kewenangan masing-masing oknum pemerintah.

## **B. Lembaga Negara**

Istilah Organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan Organ atau lembaga, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi *Non-pemerintahan* yang dalam Bahasa Inggris disebut *Non-Governmental Organization (NGO's)*. lembaga Negara itu adapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.<sup>12</sup>

Dalam kamus hukum Belanda-Indonesia<sup>13</sup>, Kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Menurut Natabaya,<sup>14</sup> penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Sedangkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika: hlm. 27.

<sup>13</sup> Marjanne Termorshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2*, Jakarta: Djambatan. hlm. 390

Menurut Montesquieu, disetiap Negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pemebntukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan esekutif yang berhungungan dengan penerapan hukum sipil.<sup>15</sup>

Karena warisan lama, harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita masih berkembang pemahaman yang luas bahwa pengertian lembaga negara dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara dikaitkan dengan pengertian lembaga yang berada di ranah kekuasaan legislatif, yang berada di ranah kekuasaan eksekutif disebut lembaga pemerintah, dan yang berada di ranah judikatif disebut sebagai lembaga pengadilan.<sup>16</sup>

Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintah, lembaga nondepartemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau kerana diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, adapula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari Undang-undang, dan bahkan adapula hanya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden.<sup>17</sup>

Menurut Jilmy Asshidiqie,<sup>18</sup> selain lembaga-lembabaga negara yang secara eksplisit disebut dalam UUD 194, adapula lembaga-lembaga Negara yang memiliki *constitutional imprortance* yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, meskipun

---

<sup>15</sup> *Ibid* Hal 30

<sup>16</sup> *Ibid* Hal 37

<sup>17</sup> *Ibid* hlm : 80

<sup>18</sup> *Ibid* hlm: 82

keberadaanya hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang. Baik yang diatur dalam UUD maupun yang diatur dengan atau dalam Undang-Undang asalkan sama-sama memiliki derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara .<sup>19</sup> Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Kedudukan lembaga yang berbeda-beda tingkatannya inilah yang ikut mempengaruhi kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.<sup>21</sup>

dari beberapa pandangan yang dipaparkan diatas sehingga penulis lebih menggunakan pada teori Jilmy Asshidiqie yang menyatakan bahwa

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm :55

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm :58

<sup>20</sup> *Ibid* hlm :37



organ tau lembaga bisa dikatan sebagai kekuatan konstitusional yang mempunyai di sesuaikan dengan keberadaan nya di dalam sebuah negara, dengan demikian lahirnya lembaga Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini merupakan suatu lembaga yang dibentuk atas dasar intruksi presiden yang dimana kekuasaan esekutif telah diberikekuasaan sepenuhnya oleh Undang-undang Dasar maka lahirnya sebuah lembaga Negara yang dibentuk oleh Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2015, antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintah perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh, sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan kejaksaan dapat berlangsung efektif dan optimal.

Mengingat pembangunan yang merupakan cita-cita negara dan bangsa secara undang-undang sudah diatur sedemikian rupa bahwa kesejahteraan rakyat harus sepenuhnya ditangan rakyat. Kemudian banyak hal yang tanpa kita sadari seringkali terjadi penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh pejabat publik dimana sering menggunakan kekuasaan yang salah dan bahkan dalam perencanaan anggaran bahkan sedikit yang melakukan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme ini yang menjadi momok di setiap daerah maka akan timbul perilaku korup. Sehingga dibentuk lah tim (TP4D) dan memiliki tim intelejen dan pengaduan dari masyarakat sebagai lembaga bantuan hukum untuk segera ditindak dan diajukan ke pengadilan apa bila ada temuan kasus

penyalahgunaan anggaran. Tim pengawalan pengamanan, dan pembangunan daerah juga saling berkoordinasi antara pihak (OPD) selaku Inspektorat dan swasta untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan anggaran dalam proyek strategis nasional.

Hal ini pula telah dijelaskan sesuai dengan instruksi Presiden dan diteruskan oleh suatu lembaga negara yang berperan dalam kekuasaan yudikatif yakni jaksa agung merupakan kekuasaan tertinggi didalam kekuasaan yudikatif dan kemudian diteruskan oleh kejaksaan se kabupaten kota untuk membentuk Tim pengawalan, pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dan diteruskan oleh keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A /JA/10/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 yang secara undang-undang juga diberi kekuasaan penuh untuk segera membentuk tim tersebut.

Akan tetapi peran lembaga negara yakni (TP4D) sangat dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena jika suatu organisasi atau lembaga dalam organisasi pemerintahan akan berjalan lambat jikalau dari satu organisasi pemerintahan hanya berdiri sendiri maka dari itu Di dalam kegiatan manajemen apapun baik di pemerintah maupun swasta semakin banyak komunitas dan jaringan yang diciptakan, akan semakin terbuka luas keuntungan yang bisa didapat. kesadaran melakukan koordinasi dan membuat kolaborasi mutlak dibangun karena musuh kemajuan dari organisasi adalah kekukurangan informasi selain itu, sadar melakukan koordinasi dan kolaborasi ini akan berimplikasi pada dampak yang positif.

### C. Koordinasi TP4D Kepada Organisasi Perangkat Daerah (inspektorat)

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoodinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas, dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh pimpinan maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Dan tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoodinasi unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional). pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003: 85).<sup>22</sup>

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85)<sup>23</sup> berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada

---

<sup>22</sup> Noviyanti Wahyuning, " E-Journal Pemerintahan Integratif". *Koordinasi Antara Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Masyarakat Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Kutai Timur*. Vol. 5 No. 1 2017. ISSN 2337-8670 X. Hal : 39

<sup>23</sup> *Ibid* Hal : 40

sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut : Koordinasi adalah dinamis, bukan statis. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran dan Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan beberapa teori yang di atas maka penulis lebih menggunakan teori Hasibuan Sehingga jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi

sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para pemegang tanggungjawab.

Koordinasi juga merupakan suatu kegiatan bersama yang melibatkan beberapa bagian, komponen, kelompok atau organisasi diperlukan koordinasi guna untuk menyempurnakan usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan yang efektif. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.<sup>24</sup>

#### 1. Prinsip-Prinsip Kerjasama

Agar dapat menghasilkan dan melaksanakan kerjasama tersebut sangat dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana terdapat dalam prinsip “good governance”<sup>25</sup>

- a) Transparansi Pemerintahan Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus transparan dalam memberikan berbagai

---

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hal : 524.

<sup>25</sup> Edralin, J.S. 1997. The new local governance and capacity building: A strategic approach. Dalam *Regional Development Studies*, Vol. 3.

data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama tersebut, tanpa ditutup-tutup.

- b) Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerjasama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik.
- c) Partisipatif dalam lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah, prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.
- d) Efisiensi dalam melaksanakan kerjasama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
- e) Efektivitas dalam melaksanakan kerjasama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hasil yang nyata diperoleh.
- f) Konsensus dalam melaksanakan kerjasama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut

dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerjasama tersebut.

- g) Saling menguntungkan dan memajukan. Dalam kerjasama antar Pemerintah Daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerjasama.

Selain enam prinsip umum di atas, beberapa prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kerjasama antar Pemerintah Daerah yaitu:

1. Kerjasama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas.
2. Keterikatan yang dijalin dalam kerjasama tersebut harus didasarkan atas saling membutuhkan.
3. Keberadaan kerjasama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat.
4. Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati.
5. Harus tertib dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana telah diputuskan.
6. Kerjasama tidak boleh bersifat politis dan bernuansa KKN
7. Kerjasama harus dibangun diatas rasa saling percaya, saling menghargai, saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua belah pihak.

Melalui beberapa definisi yang dipaparkan di atas jelas bahwa koordinasi adalah tindakan seseorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan dan kemajemukan antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang dengan yang lainnya. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara lembaga instansi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

#### **D. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara**

Dalam pandangan Tjokrowinoto (1996:191) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisiensi, inovatif, lentur dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Menurut pendapat tersebut, kemampuan aparatur lebih diartikan sebagai kemampuan melihat peluang-peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dengan mengacu pada misi yang ingin dicapai, dan kemampuan dalam meningkatkan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri secara efisiensi, melakukan inovasi yang tidak pada prosedur administrasi, bersifat fleksibel serta memiliki etos kerja yang tinggi.

Menurut Andriyas Harefa (2004: 137) bahwa profesionalisme pertama-tama adalah soal sikap profesionalisme yaitu, keterampilan tinggi, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan



yang ketat atas perilaku kerja dan suatu system balas jasa yang merupakan lambang prestasi kerja.

Pandangan lain seperti Siagian (200:163), menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan profesionalisme adalah kendala dalam pelaksanaan tugas, sehingga terlaksana dengan mutu, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Terbentuknya aparatur profesionalisme menurut pendapat tersebut memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibentuk melalui Pendidikan dan pelatihan sebagai instrument pemuktahiran. Pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh aparat memungkinkannya untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan prosedur yang sederhana. Kemampuan dan keahlian yang terbentuk juga harus diikuti dengan perubahan iklim dalam dunia birokrasi yang cenderung bersifat kaku dan tidak fleksibel. (Hessel Nogi S.T, 2005:225-226).

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia yang sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, dibutuhkan aparatur sipil negara yang profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut : nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik.

Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai : pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa.

Pegawai Aparatur Sipil Negara Bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup>

### **1. Karakteristik Profesionalisme**

Menurut Mertin jr (dalam Agung, 2005: 75) karakteristik profesionalisme apartur sesuai dengan tuntutan good governance diantaranya adalah :

#### **1. Equaliti**

Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik dan status sosialnya.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 angka 1

## 2. Equity

Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistik kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama.

## 3. Loyalty

Kesetiaan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait suatu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.

## 4. Accountability

Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan.

Berdasarkan dengan adanya berbagai teori diatas jelas bahwa profesionalisme sangat penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing para aparatur pemerintah, akan tetapi penulis lebih fokus pada teori yang dipaparkan oleh Andrius Harefa yang mengatakan bahwa profesionalisme yang berkaitan dengan sikap maupun perilaku, sehingga dapat dijelaskan bahwa dalam profesionalisme terdapat Komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk tindakan dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya

Perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab etika dan moral.

#### **E. Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruption* adalah penyuapan, *corruptore* adalah merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi berupa<sup>27</sup> :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korup (busuk, suka menerima uang suap uang/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
- c. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
- d. Koruptor, orang yang melakukan korupsi Koruptor, orang yang melakukan korupsi.

A.S. Hornby dan kawan-kawan, mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau

---

<sup>27</sup> Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8. 29 Elwi Danil, *ibid*, hlm 4

keburukan (*decay*). Sedangkan menurut David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. Keanekaragaman pengertian istilah korupsi seperti tergambar di atas, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan korupsi sebagai suatu konsep. Dengan perkataan lain, keanekaragaman pengertian istilah korupsi dapat menimbulkan kesulitan dalam menarik suatu batasan yang serba mencakup tentang makna korupsi. Menurut Robert Klitgaard menyatakan bahwa:

Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakkan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman, dan sebagainya. disamping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas mengenai korupsi maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang dikategorikan sebagai kegiatan melawan hukum, dengan melakukan perbuatan secara sadar yang tujuannya adalah memperkaya diri sendiri, serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dikatakan suatu kegiatan korupsi, dan menyalahgunakan

kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan jahat yang dilakukan seseorang baik dengan cara penggelapan atau pun penyuapan secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara serta dapat merugikan kesejahteraan rakyat.

Syed Hussein mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, Adapun ciri-ciri dari korupsi yaitu<sup>28</sup> :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik kebenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah. 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontadiktif dan mereka yang melakukan tindakan itu.

h. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

